

**PERANAN KEPALA DESA MENERTIBKAN PUNGUTAN
LIAR OBJEK WISATA AEK SIJORNI DESA AEK
LIBUNG KECAMATAN SAYUR MATINGGI
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

OLEH:
AMASIA CERIA NABABAN

218520020



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/1/26

**PERANAN KEPALA DESA MENERTIBKAN PUNGUTAN
LIAR OBJEK WISATA AEK SIJORNI DESA AEK
LIBUNG KECAMATAN SAYUR MATINGGI
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Medan Area

Oleh :

AMASIA CERIA NABABAN

218520020



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/1/26

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Peranan Kepala Desa Menertibkan Pungutan Liar Objek

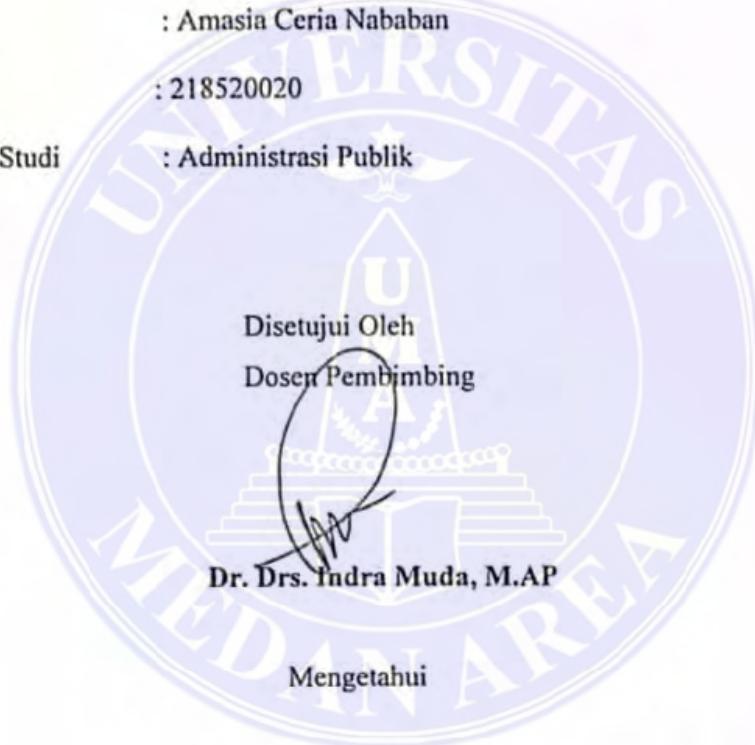
Wisata Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur

Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama : Amasia Ceria Nababan

NPM : 218520020

Program Studi : Administrasi Publik



Dekan

Ka.Prodi



Dr. Walid Mustafa, S, Sos, M.I.P



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Tanggal Lulus : 09 September 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/1/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 September 2025

Amasia Ceria Nababan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amasia Ceria Nababan
NPM : 218520020
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Kerja : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

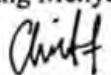
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PERANAN KEPALA DESA MENERTIBKAN PUNGUTAN LIAR OBJEK WISATA AEK SIJORNI DESA AEK LIBUNG KECAMATAN SAYUR MATINGGI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Nonekslusif Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai/penulis/pencipta/ dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Medan

Pada Tanggal : 25 September 2025

Yang Menyatakan :


Amasia Ceria Nababan

ABSTRAK

Pungutan liar atau yang sering disebut pungli ialah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk memungut biaya dalam jumlah tertentu bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Sementara itu, kata "liar" merujuk pada kondisi yang tidak teratur atau di luar aturan. Pungutan liar tindakan mengenakan biaya pada tempat, kegiatan, atau situasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pungutan liar dapat didefinisikan sebagai aktivitas meminta uang atau memungut biaya secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain, yang merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peranan kepala desa dalam menertibkan pungutan liar di objek wisata aek sijorni di Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala desa sebagai fasilitator, organisator, dan inovator dalam mengatasi pungutan liar di objek wisata aek sijorni berjalan dengan baik. Kepala desa ikut serta dalam pengelolaan objek wisata aek sijorni, serta melaksanakan sosialisasi dan evaluasi setiap bulan dan bekerja sama dengan pengelola objek wisata, aparat pemerintah setempat, dan kepala dinas pariwisata untuk mengatasi masalah praktik pungutan liar. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat sekitar masih menjadi hambatan. Oleh karena itu perlu adanya sinergi yang lebih besar antara kepala desa, pengelola objek wisata, aparat pemerintah setempat, kepala dinas pariwisata dan masyarakat untuk menertibkan praktik pungutan liar di objek wisata tersebut.

KataKunci: Peranan, Kepala Desa, Pungutan Liar, Aek Sijorni

ABSTRACT

Illegal levies refer to charges that can be interpreted as fees, dues, collections, taxes, donations, or tariffs that must be paid to the authorities. Meanwhile, the word "illegal" refers to a condition that is unregulated or outside the rules. Illegal levies involve imposing charges in places, activities, or situations that do not comply with existing regulations. Illegal levies can be defined as the act of forcibly demanding or collecting money by someone from another party, which constitutes a form of crime or criminal act. The purpose of this study is to analyze the role of the village head in regulating illegal levies at the Aek Sijorni tourist attraction in Aek Libung Village, Sayurmattinggi Sub-district, South Tapanuli Regency. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The research results show that the role of the village head as a facilitator, organizer, and innovator in addressing illegal levies at the Aek Sijorni tourist attraction is being carried out effectively. The village head is actively involved in the management of the Aek Sijorni tourist site, conducts monthly socialization and evaluations, and collaborates with tourist site managers, local government officials, and the head of the tourism office to tackle the issue of illegal levies. Despite these efforts, challenges such as low public awareness and lack of participation from the surrounding community remain obstacles. Therefore, greater synergy is needed between the village head, tourist site managers, local government officials, the head of the tourism office, and the community to effectively regulate and eliminate illegal levy practices at the tourist site.

Keywords: *Role, Village Head, Illegal Levies, Aek Sijorni*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

- 1.** Nama : Amasia Ceria Nababan
- 2.** Alamat : Desa Harean Kecamatan Tano Tombangan
Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
- 3.** Tempat/Tanggal Lahir : Harean, 24 Oktober 2002
- 4.** Jenis Kelamin : Perempuan
- 5.** Agama : Kristen Protestan
- 6.** Status Pernikahan : Belum Menikah
- 7.** Warga Negara : Indonesia
- 8.** Nomor Telepon/HP : 802294742221
- 9.** E-mail : amasianababan@gmail.com
- 10.** Kode Pos : 22775

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| 2010-2015 | : SD Negeri 101413 Harean |
| 2015-2018 | : SMP Negeri 2 Kota Tua |
| 2018-2021 | : SMA Swasta Khatolik Sibolga |
| 2012-Sekarang | : Universitas Medan Area |
| Jurusan | : Administrasi Publik |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, penyertaan dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, izinkanlah saya mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terimakasih yang tulus dan penuh cinta kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta Doharman Nababan dan Lidia Situmeang yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, kasih sayang dan pengorbanan tiada henti dalam setiap langkah hidup saya. Terimakasih atas segala didikan yang tidak ternilai, yang menjadi pijakan kokoh dalam perjalanan panjang ini.
2. Saudara-saudara saya yang saya sayangi Paten Nababan, Windra Nababan, Windro Nababan, Ricardo Nababan, dan Caesi Nababan. Terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu menguatkan saya di setiap pengerjaan hingga selesai karya ini dengan baik.
3. Kepada sahabat saya Yaya dan teman saya yang ikut membantu dan memberikan dukungan kepada saya sehingga saya mampu mengerjakan karya saya ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "*Peranan Kepala Desa Menertibkan Pungutan Liar Objek Wisata Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan*".

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada Dr. Drs Indra Muda, M.AP selaku pembimbing yang telah memberi banyak arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta Ibu Dr. Nina Angelia, S.Sos., M.Si selaku ketua yang telah banyak memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta Bapak Amas Mashudin, S.IP, M.AP, selaku sekretaris yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini, dan kepada Ibu Dr. Chairika Nst, S.AP, M.AP selaku dosen penguji saya yang telah memberikan masukan serta arahan dalam penyusunan skripsi saya ini. Disamping itu saya berterimakasih banyak kepada kedua orang tua saya Doharman Nababan dan Lidia Situmeang yang tidak henti hentinya pendidik saya dengan penuh kasih sayang hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapan terima kasih.

Medan, Mei 2025



Amasia Ceria Nababan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RIWAYAT HIDUP.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Akademik	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Peranan	6
2.2 Kepala Desa.....	10
2.2.1 Pengertian Kepala Desa.....	10
2.2.2 Tugas Kepala Desa Sebagai Pemimpin	10
2.3 Pungutan Liar (Pungli)	12
2.3.1 Faktor Penyebab Pungutan Liar	13
2.3.2 Pungutan Liar Dalam Pandangan Masyarakat.....	14
2.3.3 Dampak Pungutan Liar Bagi Masyarakat.....	14
2.4 Penelitian Terdahulu.....	16
2.5 Kerangka Berpikir	20
III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	23
3.2.1 Lokasi Penelitian	23
3.2.2 Waktu Penelitian	23
3.3 Informan Penelitian	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Teknik Analisis Data	28

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

vi

Document Accepted 19/1/26

IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian.....	31
4.1.1 Gambaran Desa Aek Libung	31
4.1.2 Visi Dan Misi Desa Aek Libung	33
4.1.3 Gambaran Umum Objek Wisata Aek Sijorni	34
4.1.4 Visi Dan Misi Objek Wisata Aek Sijorni	36
4.1.5 Struktur Organisasi.....	36
4.1.6 Uraian Tugas Pokok Pengelola Objek Wisata Aek Sijorni	38
4.2 Pembahasan Penelitian.....	41
4.2.1 Peranan Kepala Desa Menertibkan Pungutan Liar Objek Wisata Aek Sijorni Desa Aek Libung.....	41
4.2.2 Faktor Penghambat.....	62
V KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2. Waktu Penelitian	23
Tabel 3. Informan Penelitian	25
Tabel 4. Keadaan mata pencaharian penduduk Desa Aek Libung Sayurmating.	32
Tabel 5. Keagamaan penduduk Desa Aek Libung Kecamatan Sayurmatinngi	32
Tabel 6. Pendidikan penduduk Desa Aek Libung Kecamatan Sayurmatinggi	33
Tabel 7. Sarana dan prasarana	35
Tabel 8. Usaha dagang di Objek Wisata Aek Sijorni	35
Tabel 9. Usaha jasa di Objek Wisata Aek Sijorni.....	36
Tabel 10. Jumlah Pengunjung Objek Wisata Aek Sijorni	42
Tabel 11. Daftar harga tiket Objek Wisata Aek Sijorni.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	21
Gambar 2. Peta Desa Aek Libung Kecamatan Sayurmatinngi	31
Gambar 3. Objek Wisata Aek Sijorni.....	35
Gambar 4. Struktur kepengurusan Objek Wisata Aek Sijorni.....	37
Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi.....	44
Gambar 6. Pos Pengaduan Dan Pos Kesehatan.....	52
Gambar 7. Loket Penerimaan	54
Gambar 8. Kunjungan Kepala Desa	59
Gambar 9. Wawancara dengan Kepala Desa Aek Libung.....	68
Gambar 10.Wawancara dengan Kepala Pengelola Objek Wisata Aek Sijorni.....	69
Gambar 11.Wawancara dengan Pedagang/ Masyarakat.....	70
Gambar 12. Objek Wisata Aek Sijorni.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi	68
Lampiran 2. Surat Penelitian	72
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan merupakan suatu konsep yang mengacu pada hubungan-hubungan sosial tentang seberapa penting seseorang dalam struktur sosial masyarakat. Peranan mencakup norma-norma yang dibentuk oleh posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat dan merupakan rangkaian aturan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, peranan yang dimainkan oleh kepala desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah mencakup pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menentukan seberapa efektif proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 4 poin (f) menyatakan bahwa salah satu bahwa pengaturan desa adalah “meningkat pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum”. Hal ini menunjukkan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Indonesia memberi keleluasaan kepada desa untuk mengatur dan mengelola pemerintahan desa dan juga menciptakan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat desa. Undang-Undang tersebut, Kepala Desa, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja desa, diberi tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala desa diberi kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan menangani beberapa urusan otonomi daerah. Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa,"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa."

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah untuk menertibkan dan menata pungutan sektor di berbagai sektor, termasuk di sektor pariwisata. Peraturan ini menetapkan bahwa pemungutan retribusi daerah untuk tempat rekreasi dan wisata harus dilakukan oleh petugas resmi dengan dasar hukum yang jelas, dan yang diterima dari retribusi tersebut akan dimasukkan ke kas daerah. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan daerah ini dianggap sebagai pungutan liar dan akan di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya peraturan daerah bisa dijadikan landasan atau aturan dalam pengembangan objek wisata. Namun kenyataan hal tersebut belum bisa terwujud karena kurangnya kesadaran masyarakat di desa aek libung sehingga kepala desa harus berperan aktif dalam menjalin komunikasi dan melakukan pendekatan yang membangkitkan kesadsaran kepada masyarakat di sekitarnya.

Wisata Aek Sijorni, yang terletak di Desa Aek Libung,Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan,merupakan destinasi pemandian alam yang populer. Daya tarik utamanya adalah air terjun, air yang jernih, kolam renang, dan spot foto menarik, menjadikannya favorit untuk rekreasi keluarga. Menurut Pitana dalam Muda,I dkk (2023:1589) Wisata adalah daya tarik yang terkandung pada suatu daerah untuk dikembangkan menjadi suatu objek wisata yang menarik sehingga dari situ dapat menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke daerah tersebut dan biasanya masih belum dikelola dengan baik. Namun, tempat ini juga

sering menjadi lokasi pungutan liar oleh oknum tak berwenang, seperti parkir ilegal dan tiket masuk tanpa dasar hukum, yang merugikan wisatawan dan mencoreng citra wisata, desa maupun pemerintah daerah. Objek wisata Aek Sijorni yang terletak di Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, sering viral karena adanya praktik pungutan liar yang marak terjadi. Salah satu berita viral dari media setempat Pionernews.com, Tapanuli Selatan petugas mengamankan pemuda berniasial ASS pengangguran warga Desa Aek Libung lantaran kedapatan melakukan aksi pungutan liar di seputaran Objek Wisata Aek Sijorni pada rabu 2 april 2025. Dan beberapa pengunjung menyampaikan keluhan mengenai pungutan yang dilakukan berulang kali di berbagai titik menuju tempat wisata tersebut, bahkan ada yang harus membayar di hingga tiga pos yang berbeda. Kasus ini membuat heboh di media sosial dan menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.

Sebagai pemimpin tertinggi di desa, kepala desa memiliki tanggung jawab signifikan dalam menjaga ketertiban, termasuk dalam mengatasi praktik pungli di area objek wisata. Diharapkan kepala desa dapat bekerja sama dengan pengelola wisata, masyarakat, dan aparat hukum untuk menciptakan sistem pengelolaan wisata yang bersih, adil, dan transparan. Selain itu, kepala desa juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pungutan liar terhadap sektor pariwisata dan ekonomi desa. Untuk menghapus praktik ini, kesadaran masyarakat sangat penting karena pungutan liar sering dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab dengan dalih kepentingan lokal. Kepala desa dapat mendorong masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan praktik pungutan liar di objek wisata aek sijorni melalui pendekatan persuasif dan

peraturan yang tegas. Namun, dalam upaya menertibkan pungutan liar, kepala desa juga menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor yang menjadi tantangan antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan wewenang kepala desa dalam penegakan hukum, serta adanya kepentingan kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan dari pihak pungutan liar tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara masyarakat sekitar, pemerintah desa, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang lebih transparan dan bebas dari praktik pungutan liar.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Kepala Desa Menertibkan Pungutan Liar Objek Wisata Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan kepala desa aek libung dalam menertibkan pungutan liar di Objek Wisata Aek Sijorni?
2. Apa faktor penghambat kepala desa dalam menertibkan pungutan liar di Objek Wisata Aek Sijorni ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Kepala Desa Aek Libung dalam menertibkan pungutan liar di objek Wisata Aek Sijorni.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat kepala desa dalam menertibkan pungutan liar di objek wisata aek sijorni.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan ilmu administrasi publik, menambahkan literatur mengenai bagaimana peranan kepala desa dalam menrtibkan pungutan liar dan mendukung berbagai masukan atau materi perbandingan kepada peneliti yang akan melakukan studi lebih lanjut. Selain itu pengetahuan dari Universitas Medan Area dalam bidang Administrasi Publik diterapkan dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membaca hasil penelitian ini dan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat judul serupa dapat dijadikan pedoman. Manfaat penelitian ini berguna bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengevaluasi peranan kepala desa dalam mengatasi pengutan liar di objek wisata aek sijorni di Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bagi penulis dapat menambah informasi dan memperluas wawasan tentang peranan kepala desa dalam menertibkan pungutan liar objek wisata aek sijorni di desa aek libung, Kecamatan Sayur Matinggi kabupaten Tapanuli Selatan, serta menjadi pembelajaran berharga untuk mengapresiasi ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Peranan adalah proses dinamis, Seseorang menjalankan suatu peranan jika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Meskipun status adalah kumpulan hak dan tanggung jawab yang dimiliki seseorang apabila seseorang melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sesuai kedudukannya, ia melakukan fungsi. Karena kedudukan dan peranan bergantung satu sama lain dan sebaliknya, keduanya tidak dapat dipisahkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Namun, norma masyarakat sudah mengatur peranitusendiri. Levinso Soekanto (2009:212- 213) mengatakan peranan mencakup tiga hal antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu yang penting bagi struktur social masyarakat.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat

Peranan, menurut Thoha (2012:10), didefinisikan sebagai suatu rangkaian kepribadian yang teratur, yang ditunjukkan oleh suatu jabatan tertentu atau kantor yang mudah dikenal. tindakan seseorang mungkin juga dapat memengaruhi cara peranan dilakukan. Setelah seseorang menyadari bahwa mereka tidak dapat bekerja sendiri, mereka menerima peran. Mempunyai lingkungan di mana kita selalu perlu berinteraksi masing-masing akan memiliki lingkungan mereka sendiri kerena lingkungan itu luas dan beragam. Namun, peranan yang harus dimainkan tidak berbeda dengan teori menurut Miftah. Menurut Suharimin (2018:76), hak dasarnya adalah wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu,

sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab atau beban yang harus dijalankan.

Menurut Soejono Soekanto (2002:76), menjelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari status seseorang dalam masyarakat. Ketika individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki, ia sedang melaksanakan peranannya. Meskipun kedudukan dan peranan saling berkaitan, keduanya memiliki perbedaan konseptual yang penting dalam ilmu pengetahuan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, begitu pula sebaliknya, kedudukan tidak dapat dipisahkan dari peranan. Selain itu, peranan memiliki dua makna, Setiap individu memiliki beragam peran yang muncul dari pola interaksi sosialnya, yang berarti peran seseorang dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan hubungan yang dijalainya.

Setiap orang di dalam komunitas memiliki kewajiban sosial yang bervariasi tergantung pada posisinya. Variasi dalam kewajiban ini menciptakan peran yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Peran ini sangat penting untuk mempertahankan keorderaan sosial. Melalui peran tersebut, individu dapat mengerti apa yang diharapkan darinya. Dalam berbagai lingkungan, baik masyarakat maupun organisasi, individu berinteraksi dan menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan status yang mereka pegang. Status ini, baik dalam pekerjaan, keluarga, atau kehidupan sosial, menentukan bagaimana individu seharusnya bertindak dan berperilaku. Sejalan dengan pandangan Suhardono (1994:15), peranan dapat dipahami sebagai pedoman yang memberikan batasan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam posisi tertentu.

Peranan mencakup 3 aspek utama :

1. Peranan mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial.
2. Peranan juga merujuk pada konsep mengenai tindakan yang dapat dilakukan individu dalam lingkungan organisasi sosial.
3. Selain itu, peranan dapat dipahami sebagai pola perilaku yang memiliki makna penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selain itu, menurut Soekanto (2002: 243), membahas berbagai peranan yang dimainkan setiap orang dalam masyarakat sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

1. Bahwa peranan tertentu harus dilakukan jika struktur masyarakat ingin bertahan.
2. Peranan tersebut seharusnya diberikan kepada mereka yang dianggap mampu melakukannya oleh masyarakat. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan memiliki keinginan untuk melakukannya.
3. Masyarakat kadang-kadang menemukan orang-orang yang tidakmampu melakukan peran mereka sebagaimana yang diharapkan.Karena pelaksanaannya mungkin memerlukan pengorbanankepentingan pribadi yang berlebihan.
4. Masyarakat belum tentu dapat memberikan peluang yang seimbang jika semua orang mampu dan sanggup melaksanakan peranannya. Sering kali terlihat bahwa masyarakat terpaksa membatasi peluang.

Pentingnya peranan untuk menentukan posisi seseorang dalam masyarakat.

Posisi seseorang dalam masyarakat adalah komponen statis yang menunjukkan

posisi seseorang dalam struktur masyarakat. Kami harus mempertimbangkan kembali hal ini karena orang cenderung mengutamakan posisi daripada peran.

Selain itu, hal ini menunjukkan tanda-tanda bahwa dia lebih mengutamakan prinsip materialisme daripada prinsip spiritualisme. Dalam kebanyakan kasus, tingkat materialisme seseorang diukur dengan adanya ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang lahir dan umumnya bersifat konsumtif. Tingkat tinggi atau rendahnya prestise seseorang ditentukan oleh ciri-ciri lahiriah tersebut.

Peranan tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi tindakan individu, tetapi juga sebagai acuan dalam menjaga hubungan yang harmonis dan efektif antar anggota masyarakat atau organisasi. Menurut, Suhardono (1994:15), peranan merupakan sekumpulan standar yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan seseorang sesuai dengan posisinya. Berdasarkan teori peranan Suhardono (1994:15), tugas dan tanggung jawab kepala desa mencakup :

1. Kepala Desa Sebagai Motivator

Kepala desa berperan sebagai motivator, bahwa dalam hal memotivasi Masyarakatnya dalam pembangunan desa adalah dengan cara mengundang atau mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam menentukan program-program desa dan mengorganisasikan semua aktor yang terlibat dalam pemerintahan baik itu pegawai pemerintahan desa dan juga masyarakat.

2. Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, kepala desa bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai kebutuhan yang mendukung proses pembangunan, termasuk penyediaan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan fisik, seperti perbaikan jalan.

3. Kepala Desa Sebagai Mobilisator

Sebagai inovator, sebagai mobilisator Peran kepala desa sebagai mobilisator yaitu tindakan Kepala Desa penggerak atau mengajak masyarakat ikut bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan kerja bakti dan menggerakkan masyarakat dalam pertemuan desa serta memunculkan ide dan pemikiran akan hal-hal baru yang mendukung pemerintahan dan peningkatan kelancaran pembangunan desa.

Setiap fungsi memiliki tujuan untuk membangun interaksi antara seseorang dan orang-orang yang terkait dengan fungsi tersebut, serta hubungan yang terjalin mengikuti norma-norma sosial yang harus dihormati dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dari pendapat yang telah disampaikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban yang dimiliki.

2.2 Kepala Desa

2.2.1 Pengertian Kepala Desa

Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, dan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepala desa adalah penguasa tertinggi di desa, berfungsi sebagai pemimpin formal dan informal, dan selalu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya, menurut Widjajah (2008:27). Kepala Desa memiliki tanggung jawab memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, Bamusdes, dan masyarakat.

Soerjono Soekanto (2004:27), kepemimpinan (*leadership*) didefinisikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, yaitu para pengikutnya. Berbagai ahli telah mengembangkan pemahaman tentang kepemimpinan dengan penjelasan yang beragam, namun pada dasarnya, semua definisi tersebut memiliki maksud dan tujuan yang serupa (Lahada, G. 2020).

2.2.2 Tugas Kepala Desa Sebagai Pemimpin

Kepala desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat dan berperan sebagai perwakilan warga dalam mengatur, melindungi, serta menginspirasi mereka dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan desa. Dalam proses pembangunan, kepala desa bertanggung jawab atas berbagai berbagai, bidang termasuk pemerintahan kemasayarakatan, ekonomi,

keamanan, ketertiban, serta hukum dan adat istiadat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan sosial masyarakat, serta memperdayakan warga desa. Dengan demikian salah satu peranan kepala desa adalah menjalankan pembangunan wilayahnya.

Pemimpin tidak hanya merujuk pada pemerintah, tetapi juga mencakup semua individu yang diberi tugas dan tanggung jawab, termasuk orang tua dalam keluarga yang juga berperan sebagai pemimpin. Seorang kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat, keterampilan, serta jiwa kepemimpinan, selain menjalankan berbagai tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Berdasarkan hal tersebut, kepala desa dapat mengelola program pembangunan di desanya apabila memiliki sifat dan kriteria sebagai seorang pemimpin. Menurut Atmo Sudirdjo (2002: 212), terdapat empat syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu :

1. Seorang pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap kondisi lingkungannya, serta bersedia menerima saran dan pandangan dari orang-orang di sekitarnya yang memiliki pengalaman yang berkaitan dengan tugas yang dijalankannya.
2. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi lingkungannya, dengan menyadari kekurangannya sendiri dan memberikan contoh yang baik dalam setiap instruksi yang diberikan kepada bawahannya.
3. Seorang pemimpin harus memiliki sikap dan sifat setia terhadap janji yang diucapkannya, loyal terhadap organisasi, atasan, bawahan, tugas atau misi yang diemban, serta terhadap pemerintahannya dan berbagai tanggung jawab lainnya.
4. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, yaitu dengan kecakapan, ketelitian, dan kecerdasan dalam menetapkan keputusan setelah mempertimbangkan semua faktor

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa sangat diharapkan oleh pemerintah saat ini agar mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila secara autentik, bukan kepemimpinan yang tidak terarah atau mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Untuk mendorong kerja sama dengan orang lain, seorang pemimpin dapat memanfaatkan kewibawaannya atau menggunakan wewenang formal yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, kepemimpinan kepala desa memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dari instansi lainnya, karena harus memiliki kepekaan terhadap dinamika politik di masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan dalam birokrasi pemerintahan sangat diperlukan, terutama dalam menjalankan tugas dan program pembangunan yang bersifat baru dari pemerintah.

2.3 Pungutan Liar (Pungli)

Pungutan liar atau yang sering disebut pungli ialah suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk memungut biaya dalam jumlah tertentu bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Sementara itu, kata "liar" merujuk pada kondisi yang tidak teratur atau di luar aturan. Menurut Hot (2017:9), pungutan liar didefinisikan sebagai pemberian secara langsung uang, barang, atau fasilitas tertentu kepada pejabat pemerintah atau pejabat yang bernaung di bawah suatu organisasi atau kelompok dengan tujuan tertentu, oleh pelanggaran hukum yang mengaturnya.

Pungutan liar (pungli) adalah tindakan mengenakan biaya pada tempat, kegiatan, atau situasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pungutan liar dapat didefinisikan sebagai aktivitas meminta uang atau memungut biaya secara paksa oleh seorang kepada pihak lain, yang merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana. Fenomena pungutan liar ini bukanlah sesuatu yang baru. Secara

etimologis, istilah "pungutan liar" merujuk pada aktivitas meminta bayaran atau uang secara paksa, sehingga jelas bahwa pungli adalah bentuk pelanggaran hukum.

2.3.1 Faktor Penyebab Pungutan Liar

Dalam pelayanan publik, masyarakat rentan menjadi korban pungli karena memiliki daya tawar yang lemah. Mereka sering kali "dipaksa" memberikan uang tambahan akibat kurangnya lembaga pengawasan yang mampu mengendalikan birokrat yang melakukan pungli. Selain itu, masyarakat tidak memiliki akses ke lembaga pengaduan yang dapat dipercaya karena rendahnya kepercayaan terhadap birokrat. Pengaduan masyarakat juga sering diabaikan oleh inspektorat sebagai pengawas internal. Di sisi lain, masyarakat turut berkontribusi pada maraknya pungli dengan membiasakan memberikan uang tanpa keberanian menolak pembayaran di luar biaya resmi. Kebiasaan "memberi" ini sulit dihilangkan karena sudah menjadi budaya sejak masa feudal, ketika masyarakat terbiasa memberikan upeti kepada raja dan aparat kerajaan.

Terdapat beberapa faktor penyebab seseorang melakukan pungutan liar yaitu:

1. Penyalahgunaan Kekuasaan, Oknum tertentu menggunakan jabatan atau kewenangan mereka untuk melanggar aturan dan melakukan pungutan liar.
2. Faktor Mental dan Karakter, Kelemahan dalam pengendalian diri atau perilaku individu dapat memengaruhi tindakan mereka.
3. Faktor Ekonomi, Pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak seimbang dengan tanggung jawab pekerjaan, mendorong seseorang untuk melakukan pungutan liar.
4. Faktor Budaya dan Organisasi, Kebiasaan yang terbentuk dalam suatu lembaga, seperti praktik pungli dan penyuapan yang terus berlangsung, menjadikan perilaku ini tampak normal.
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Jumlah atau kualitas tenaga kerja yang tidak memadai.
6. Lemahnya Pengawasan, Kurangnya pengendalian atau pengawasan yang efektif dari atasan memungkinkan praktik pungutan liar terjadi.

2.3.2 Pungutan Liar Dalam Pandangan Masyarakat

Istilah pungli sudah dipahami dan cukup dikenal luas oleh masyarakat sebagai bentuk pelanggaran, namun masih ada masyarakat yang tidak peduli dan membiarkan praktik pungli ini terjadi. Berkaitan erat dengan karakteristik masyarakat setempat, pungli cenderung berkembang saat masyarakat kurang peduli atau tidak memiliki keberanian untuk melaporkan pungli kepada pihak berwenang. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat cenderung mentoleransi pungli, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pungli merupakan bentuk maladministrasi.
2. Adanya budaya yang cenderung mudah memaafkan dan merelakan.
3. Kurangnya keberanian dalam diri masyarakat untuk melaporkan praktik pungutan liar.
4. Masih ada sebagian masyarakat yang menganggap pungli menguntungkan, karena dengan membayar pungli, mereka bisa memperoleh kemudahan dalam layanan.

Kecenderungan masyarakat yang mentoleransi pungli ini menyebabkan upaya pemberantasan pungli menjadi kurang efektif. Di satu sisi, pemerintah dengan bantuan Satgas Saber Pungutan liar aktif melakukan pemberantasan pungli, namun di sisi lain, masyarakat sendiri yang justru menjadi penyebab tumbuhnya praktik pungutan liar dalam pelayanan publik. Sikap permisif terhadap pungli ini harus dihilangkan agar pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan secara tuntas.

2.3.3 Dampak Pungutan Liar Bagi Masyarakat

Masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar selama proses pelayanan publik. Masyarakat memberikan dana tambahan untuk memaksa birokrasi yang sering melakukan pungutan liar, tetapi mereka juga sering berkontribusi pada peningkatan pungutan liar dengan meminta uang tanpa mampu

bersikap kritis, seperti menolak pembayaran di luar biaya resmi. Oleh karena itu, gejala pungutan liar sebenarnya merupakan proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit; dengan kata lain, sekelompok masyarakat meniru tindakan elit pemerintah. Hal ini menjadi masuk akal karena adabanyak pembayaran yang dilakukan atas nama pemerintah kota tetapi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas itu. Meskipun menggunakan kertas berwarna merah atau kuning sebagai bukti, masyarakat masih bertanya- tanya. Dengan keadaan seperti itu, masyarakat dapat memperkirakan. Apakah laporan penerimaan daerah tidak memasukkan uang retribusi? karena tindakan yang dilakukan pemerintah kota tampaknya menjadi sumber masalah. (Nurhayati, 2020 :22-23)Ada beberapa masalah atau konsekuensi yang dapat timbul jika praktik pungutan liar (pungli) terus berlangsung, di antaranya:

1. Merusak Moral

Pungutan liar mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, merusak rasa cinta tanah air, dan menciptakan pandangan bahwa segala sesuatu dapat diatur dengan uang.

2. Merusak Budaya

Pungutan liar yang terus-menerus terjadi dapat menciptakan budaya koruptif yang sulit dihilangkan. Untuk itu, tindakan pungli harus segera ditindak tegas agar budaya buruk ini tidak berkembang.

3. Merusak Demokrasi

Pungutan liar dalam bentuk penyogokan pemilu merusak prinsip demokrasi, menjauhkan rakyat dari kebebasan memilih dengan cara yang adil.

4. Merusak Ekonomi

Pungutan liar memperburuk perekonomian, menghambat pertumbuhan perusahaan, mengurangi lapangan kerja, dan menciptakan ketidakefisienan.

5. Krisis Kepercayaan

Pungutan liar menyebabkan hilangnya kepercayaan pada lembaga hukum dan pemerintah, membuat masyarakat merasa tidak puas dengan penanganan kasus korupsi, dan lebih cenderung menyelesaikan masalah secara pribadi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam hasil penelitian sebelumnya, sehingga peneliti dapat mengamati kelebihan dan kekurangan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk memperkaya kajian terkait judul penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Hasil	Perbedaan dan persamaan
1	Implementasi pasal 7 ayat (2) peraturan Daerah kabupaten Tapanuli Selatan nomor 10 tahun 2006 tentang Retribusi tempat rekreasi dan olahraga(studikasusdi Aek Sijorni desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi kabupaten Tapanuli Selatan) (Adhia Rahma Shinta Harahap)	Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh mengenai Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena retribusi yang dipungut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis	-Perbedaan penelitian ini terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu berfokus pada Implementasi peraturan pasal 7 ayat (2) peraturan daerah kabupaten tapanuli elatannomor 10 tahun 2006 tentang retibusi tempat rekreasi dan olah raga -Persamaan, sama-sama menggunakan metode kualitatif dan lokasi penelitian sama

		implementasiPasal7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Penulis memunculkan rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi retribusi tempat rekreasi di Aek Sijorni dan apa faktor penghambat implementasi retribusi tempat rekreasi di Aek Sijorni Kabupaten Tapanuli Selatan.	
2	Faktor Penyebab dan Solusi Terhadap Pungutan Liar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pemerintahan Desa (Abdul Rohman) Tahun 2022	Penelitian ini menemukan bahwa pungutan liar dalam administrasi kependudukan di desa disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparatur desa tentang tugas dan fungsi mereka, lemahnya sanksi, serta budaya pungutan liar yang sudah melekat. Solusi yang diusulkan meliputi peran teladan dari Kepala Desa, sosialisasi mengenai peran dan tanggung jawab aparatur, serta upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menghapus praktik pungutan liar.	- Perbedaan, pebelitan terdahulu dari judul yaitu faktor penyebab pungutan liar pelayanan administrasi kependudukan pada pemerintahan desa, serta lokasi penelitian dan metode penelitian -persamaan, sama-sama membahas mengenai tentang pungutan liar.

3	Komunikasi Publik pemerintah desa dalam upaya menghapus pungutan liar wisata pemandian si debuk debuk desa doulu berastagi (Legan Natasia Sembiring). Tahun 2023	Penelitian ini berlatar belakang pada maraknya kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia telah merusak sendiri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berbangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi publik pemerintah desa dalam upaya menghapus pungutan liar apa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di wisata sidebuk-debuk desa Doulu Berastagi.	Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada komunikasi publik pemerintah desa dalam upaya menghapus pungutan liar serta lokasi penelitian berbeda. Persamaan, sama-sama menggunakan metode kualitatif.
4	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pungutan liar (Pungli) (Wayan Arsa Yogi Wiguna, Nyoman Sujana, Nyoman Gde Sugiartha. Tahun 2020)	Hasil dari penelitian ini bahwa terkait dengan pengaturannya tersirat dalam rumusan korupsi pada beberapa Pasal diantaranya Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Sanksi hukum terhadap pungutan liar terdiri atas sanksi sosial, sanksi pidana. Perundangan tentang tindak pidana korupsi tercantum di dalamnya tentang tindak pidana pungutan liar.	- Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan yuridis tindak pidana pungutan liar dan lokasi penelitian berbeda - Persamaan, sama-sama membahas tentang pungutan liar.

5	Perspektif Wisatawan Terhadap Kegiatan Pungutan Liar di Kawasan Wisata Kuliner Pasar Lama Tangerang (Livia Christy Harsana, Johann Wahyu Hasmoro Prawiro). Tahun 2024	<p>Wisata kuliner di Pasar Lama Tangerang merupakan wisata kuliner yang diminati oleh para pengunjung karena wisata kuliner Pasar Lama Tangerang berada di wilayah yang strategis dan merupakan salah satu kawasan bersejarah. Namun, meskipun banyak diminati oleh para pengunjung, masih terdapat isu terkait terjadinya praktik pungutan liar di kawasan wisata kuliner Pasar Lama Tangerang.</p> <p>Adanya praktik pungutan liar dapat mempengaruhi dan merugikan beberapa pihak termasuk wisatawan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada perspektif wisatawan terhadap kegiatan pungutan liar. - Persamaan, sama-sama menggunakan Metode Kualitatif
---	---	--	--

Penelitian saya ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan studi sebelumnya, baik dalam hal fokus, objek yang diteliti, maupun pendekatan peran. Penelitian yang dilakukan oleh Adhia Rahma Shinta Harahap, misalnya, berfokus pada bagaimana penerapan peraturan daerah mengenai retribusi di lokasi wisata Aek Sijorni. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus menganalisis peranan kepala desa dalam menanggulangi praktik pungutan liar, dengan mengacu pada indikator sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator menurut teori Suhardono (1994). Di samping itu, penelitian sebelumnya umumnya lebih menekankan pada aspek hukum, administrasi, atau komunikasi publik, sementara penelitian ini lebih mengutamakan peran kepemimpinan kepala desa dalam konteks sosial pemerintahan desa serta keterlibatannya secara langsung dalam pengawasan pungutan liar di tempat wisata.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

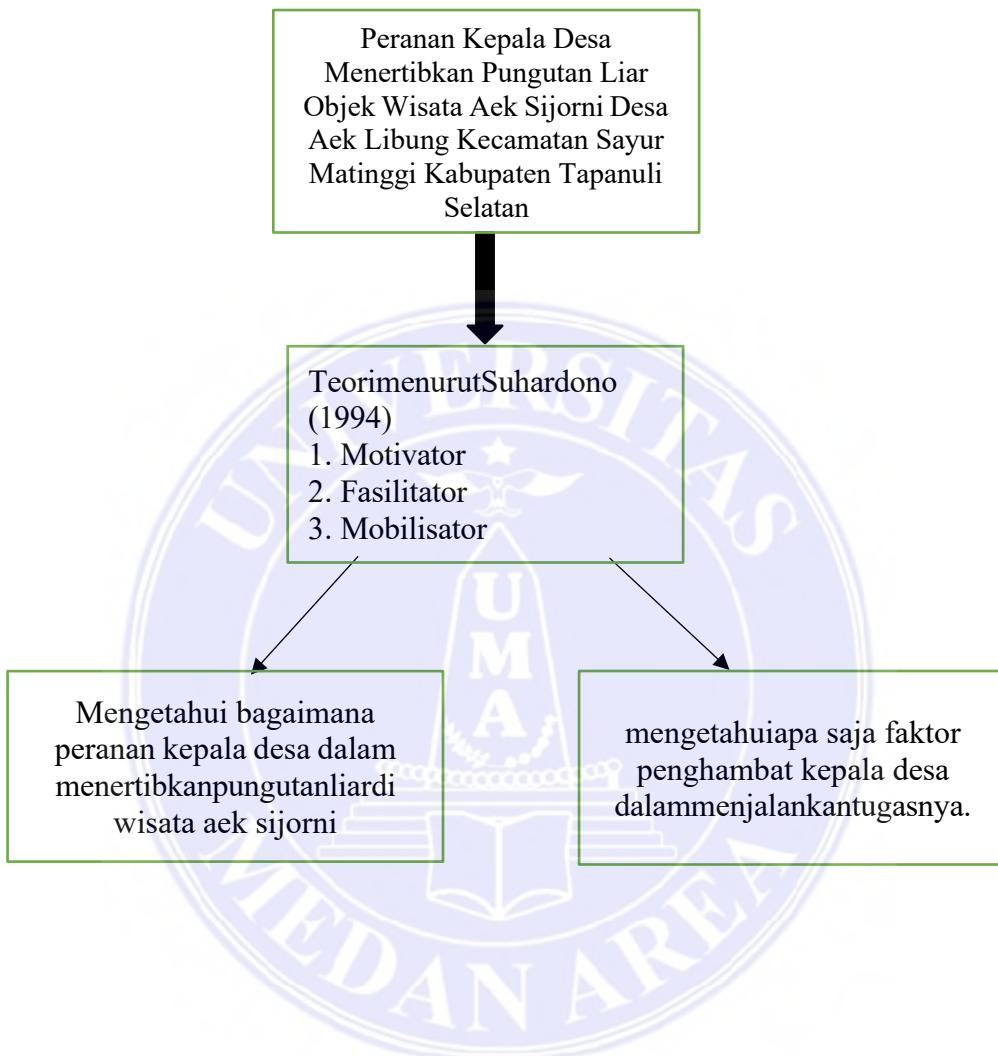
2.5 Kerangka Berpikir

Dalam bukunya Sugiyono (2017:66) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran adalah dasar yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah, kerangka pemikiran merupakan rancangan atau gambaran dari fakta-fakta, teori, kaiian pustaka, serta observasi yang telah dilakukan yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dari penjelasan mengenai kerangka pemikiran maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berfikir adalah pola pikir mengenai hubungan antara variable atau permasalahan terhadap suatu peristiwa yang menjadi hipotesis dalam penelitian.

Pada lokasi penelitian ini telah ditentukan di Desa aek libung untuk mendeskripsikan peranan kepala desa dalam menertibkan pungutan liar objek wisata aek sijorni di desa aek libung, kecamatan sayur matinggi, kabupaten tapanuli selatan. Dengan menggunakan teori Suhardono yaitu, fasilitator, organisator, dan motivator.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Creswell (dalam Juliansyah 2010:34) penelitian kualitatif digambarkan sebagai pendekatan yang kompleks, yang berfokus pada penggunaan kata-kata, laporan mendalam dari sudut pandang responden, serta studi yang dilakukan dalam kondisi alami. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung memakai analisis induktif, dengan penekanan lebih pada proses dan makna dari perspektif subjek. Teori digunakan sebagai panduan untuk menjaga fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan, serta membantu memberi gambaran umum tentang konteks penelitian dan sebagai bahan diskusi atas hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bersifat deskriptif dan naratif, serta menekankan pada analisis mendalam terhadap objek yang diteliti. Karena fokus metode kualitatif adalah pada eksplorasi yang menyeluruh, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memulai dari data, menggunakan teori yang ada sebagai referensi untuk penjelasan, dan akhirnya menghasilkan sebuah teori. sebagai instrumen utama. Karena itu, peneliti perlu memiliki pengetahuan teori dan wawasan yang luas agar dapat mengajukan pertanyaan, menganalisis, serta menyusun objek penelitian secara lebih mendalam. Penelitian kualitatif lebih menitik beratkan pada makna serta terkait dengan nilai-nilai tertentu. Pendekatan ini dipilih ketika masalah belum sepenuhnya jelas, untuk mengungkap

makna tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memverifikasi data, atau meneliti perkembangan sejarah.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berjudul Peranan Pemerintah menertibkan pungutan Liar Objek Wisata Aek Sijori Desa Aek Libung Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana proses penelitian akan dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian di kantor kepala desa dan di Objek Wisata Aek Sijorni Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sayur Matinggi, Desa Aek Libung, Sumatera Utara.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 2.Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agus 2025	Sep 2025
1.	Penyusunan Proposal									
2.	Seminar Proposal									
3.	Perbaikan Proposal									
3.	Pelaksanaan Penelitian									
4.	Seminar Hasil									
5.	Revisi Skripsi									
7.	Sidang Meja Hijau									

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu maupun kelompok yang bisa memberikan informasi, dimana yang diperoleh dari informan penelitian tersebut bisa berupa orang, benda, maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang bisa memberikan informasi terhadap dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu peristiwa yang terjadi kepada peneliti secara mendalam. Informan penelitian dengan teknik purposive sampling, pemilihan informan penelitian didasarkan kepada peninjauan bahwa informan peneliti dapat memberikan informasi yang relevan dengan detail secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik yang dilakukan dalam pemilihan informan dalam kegiatan ini adalah perangkat daerah di Kecamatan Sayur Matinggi yang menangani langsung suatu kejadian yang sedang diteliti. Informasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang berwibawa dan memiliki pengaruh sehingga dipercaya dapat memberikan informasi mengenai objek penelitian. Penelitian akan melakukan wawancara kepada informan terkait dan mencatat hasil wawancara. Informan kunci merupakan orang yang paling mengetahui dari segala aspek yang ingin dikaji oleh peneliti, sehingga informan kunci diperlukan sebagai tempat untuk bertanya dan mendapatkan gambaran dari keseluruhan tentang masalah yang sedang diamati. Pada penelitian informan kuncinya adalah Kepala Desa, Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Bapak Suparman.

2. Informan Utama

Informan Utama adalah individu maupun kelompok yang terlibat langsung dalam interaksi sosial terkait objek yang sedang diteliti. Informan Utama dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang diteliti dari secara teknik maupun informasi detail permasalahan. Pada penelitian ini Informan Utamanya adalah pengelola objek wisata aek sijorni, Bapak Wawan.

3. Informan Tambahan

Informan Tambahan adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi sekunder terkait masalah penelitian, informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi pelengkap untuk ditambahkan didalam analisis penelitian. Informan tambahan dapat memberikan informasi yang terkadang tidak didapatkan oleh informan kunci dan informan utama. Pada penelitian ini Informan Tambahannya adalah masyarakat/pedagang di objek wisata aek sijorni Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Ibu Nurlela, Ibu Suryani Dan Bapak Rahmat.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Informan Kunci	Suparman	Kepala desa	1 Orang
2	Informan Utama	Wawan	Kepala Pengelola Objek wisata	1 Orang
3	Informan Tambahan	1.Nurlela 2.Suryani 3.Rahmat	Masyarakat/Pedagang	3 Orang

Sumber : Di Olah Oleh Peneliti

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Grout dan Le Conte bahwa “dalam penelitian kualitatif, sumber data terdiri dari beberapa jenis, bisa dari manusia, peristiwa, tempat, benda, serta dokumen atau arsip. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati suatu objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan seluruh indera (seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa) untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Macmillan & Schumacher dalam Agustinova (2015:37) Pengamatan atau observasi didefinisikan proses melihat pola perilaku individu dalam situasi tertentu guna mendapatkan informasi mengenai fenomena yang diminati. Observasi ini diharapkan akan memberikan data yang lebih kaya dan mendalam, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai Peranan Pemerintah Menertibkan Pungutan Liar Objek Wisata Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Wawancara

Sugiyono dalam Agustinova (2015:33) wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dibentuk pemahaman mengenai suatu topik tertentu. Dalam pengertian ini, wawancara melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara atau

interviewer yang melakukan wawancara, dan pihak yang diwawancarai atau interview. Wawancara adalah proses komunikasi penting dalam penelitian, karena memungkinkan pengumpulan data yang lebih mendalam dengan menggali pemikiran atau pendapat secara rinci. Selain itu, wawancara juga berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi atau membuktikan kebenaran informasi yang telah diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi Sugiono, dalam Agustinova (2015:39). Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui berbagai dokumen dan tulisan yang relevan guna merumuskan konsep penelitian dan menggali informasi terkait objek penelitian. Studi dokumen melibatkan penelaahan dan pengutipan teori-teori relevan untuk menyusun dasar penelitian. Teknik ini juga bertujuan menggali informasi dan data faktual yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang, dan berfungsi melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, sehingga hasil penelitian lebih kredibel.

4. Triangulasi

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang

handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisasi data, membaginya ke dalam unit-unit, mensintesis, menyusun pola, dan memilah informasi yang penting untuk diteliti. Proses ini dimulai sebelum peneliti terjun ke lapangan, kemudian berlanjut selama penelitian berlangsung secara interaktif dan terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh. Kejemuhan data terjadi saat tidak ada lagi informasi atau data baru yang ditemukan.

Dalam hal ini Naution dalam Agustinova (2015:63) analisis dimulai sejak perumusan dan penjelasan masalah, sebelum penelitian lapangan dimulai, dan berlangsung terus hingga penulisan hasil penelitian selesai. Analisis data menjadi panduan untuk penelitian berikutnya hingga, jika memungkinkan, menghasilkan teori yang terbangun dari data (*grounded theory*). Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih banyak difokuskan selama proses di lapangan, bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data.

Miles dan Huberman dalam Agustinova (2015:63-64) mengemukakan dalam analisis data kualitatif, aktivitas dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkesinambungan hingga selesai, sehingga data yang diperoleh mencapai titik kejemuhan. Kejemuhan data ditandai dengan tidak adanya lagi data atau informasi baru yang muncul.

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif berisi catatan apa adanya tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami langsung oleh peneliti tanpa memasukkan pendapat atau interpretasi. Sementara itu, catatan reflektif mencakup kesan, komentar, pendapat, dan interpretasi peneliti terhadap temuan yang diperoleh, yang juga digunakan sebagai bahan untuk merencanakan pengumpulan data di tahap selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari analisis yang bertujuan menyederhanakan, menyaring, dan menyempurnakan data. Proses ini melibatkan penghapusan data yang tidak relevan, penambahan data yang diperlukan, serta pengorganisasian data mentah menjadi lebih jelas. Dengan bantuan alat seperti komputer, data dapat dikodekan, dirangkum, dan dikategorikan, sehingga mempermudah analisis dan pengumpulan data lanjutan.

3. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tulisan, kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk mengintegrasikan informasi sehingga dapat menggambarkan situasi yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian singkat. Miles dan Hubberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang memperjelas gambaran suatu objek, dapat berupa hubungan kausal, interaktif, hipotesis, atau teori. Milles dan Huberman menyatakan bahwa penarikan kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jabarkan melalui hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan kepala desa Aek Libung menertibkan pungutan liar di objek wisata Aek Sijorni telah menjalankan peranan sebagai motivator dengan memotivasi masyarakat dalam menertibkan pungutan liar di objek wisata Aek Sijorni desa aek libung, sebagai fasilitator kepala desa sudah memberikan fasilitas untuk mendukung dalam menertibkan pungutan liar tetapi untuk menggunakan fasilitas tersebut masyarakat masih kurang berpartisipasi sehingga belum berjalan denganaik dan sebagai mobilisator kepala desa sudah menggerakkan serta mendorong masyarakat dalam melakukan kegiatan sosialisasi untuk menertibkan pungutan liar di objek wisata Aek Sijorni.
2. Faktor yang penghambat kepala desa dalam menertibkan pungutan liar di objek wisata Aek Sijorni yaitu rendahnya kesadaran serta partisipasi Sebagian dari masyarakat, terutama di kalangan petani dan pengangguran yang merasa tidak berperan dalam isu pungutan liar. Masyarakat juga jarang berpartisipasi dalam sosialisasi karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Kurangnya rasa kepemilikan terhadap destinasi wisata membuat usaha kepala desa menjadi tidak maksimal. Selain itu, masih ada Sebagian masyarakat yang menganggap pungutan liar sebagai hal yang biasa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Peranan Kepala Desa menertibkan pungutan liar Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat .

1. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi yang tepat , kepala desa seharusnya melaksanakan sosialisasi pada waktu yang dapat disesuaikan dan menggunakan metode yang lebih mendekat, contohnya dengan melakukan kunjungan langsung atau berbincang santai. Penyampaian edukasi harus dirancang dengan cara yang praktis agar masyarakat menyadari bahwa pungutan liar memiliki dampak negatif terhadap reputasi dan perekonomian desa.
2. Membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap wisata,penting bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata melalui kegiatan kolaboratif, diskusi kelompok, atau pemberian insentif, agar mereka mempunyai rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga objek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpuslis.

Ibrahim Hot,2017, “Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli” Yogyakarta, CV Budi Utama

Levinso dan Soekanto, 2009:213, Peranan, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta

Miftah thoha.2012.Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Noor, J. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soekanto, S. (2002:243). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Soekanto dan Hani Handoko Kepemimpinan dan Motivasi Ghalia Indonesia Jakarta 1985 (NurinFritriana, 2020)

Soekanto, S. (2004). Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Gravindo Persada

Suhardono, Edy, (1994). Teori Peran, Konsep, Deviasi dan Implikasi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Widjaja, HAW. (2012) Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada

JURNAL

Batubara, Taufik. *Analisis kepuasan pengunjung pada objek wisata Aek Sijorni Kabupaten Tapanuli Selatan*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.

Br Sembiring, Legan Natasia. *Komunikasi Publik Pemerintah Desa Dalam Upaya Menghapus Pungutan Liar Wisata Pemandian Sidebuk Debuk Desa Doulu Berastagi*. Diss. Universitas Medan Area, 2023.

Harahap, Adhia Rahma Shinta "Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (studi kasus di Aek Sijorni Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan)" (2021)

Harsana, Livia, and Johann Prawiro. "Perspektif Wisatawan Terhadap Kegiatan Pungutan Liar di Kawasan Wisata Kuliner Pasar Lama Tangerang." *Jurnal Pariwisata dan Perhotelan* 2.1 (2024): 10-10.

Hidayatulloh, Mohammad Riyam. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal." *Jurnal Legisia* 15.1 (2023): 36-49.

Hutapea, Juli Antoro, 2016, Perbuatan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Vol. I, No.1, 2016

Muda, I. M., Angelia, N., & Pulungan, W. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Potensi Wisata Desa Guru Singa Kabupaten Tanah Karo. *Jurnal SOLMA*, 12(3), 1589.

Nasution, Anwar Sulaiman. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar di Objek Wisata Aek Sijorni Tapanuli Selatan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.2 (2023): 17673-17677.

Nurcahyo, R. Priyo Yuli, and Syukron Abdul Kadir. "Pungutan Biaya Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 106 Tahun 2022." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2.5 (2023): 1168-1173.

Nurhayati, 2020. Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Menanggulangi Pungutan Liar (Pungli), Kab.Dompu.

Putra, Kadek Agus Purwadi, and Kadek Julia Mahadewi. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pungutan Liar di Pelayanan Publik Provinsi Bali." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 1229-1234.

Ramadhani, Wahyu. "Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12.2 (2017): 263-276.

Rohman, Abdul. "Faktor Penyebab dan Solusi Terhadap Pungutan Liar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pemerintahan Desa." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2022): 90-107.

PERATURAN PRUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

WEBSITE

<https://www.gramedia.com/literasi/pungli-adalah/#:~:text=Merusak%20Moral,-Warga%20negara%20Indonesia&text=Akibatnya%2C%20kepercayaan%20masyarakat%20kepada%20pemerintah,sesuatunya%20bisa%20diatur%20de ngan%20uang.>

Pioner News <https://share.google/INST6OYqYse5zFXwX>



Lampiran 1. Dokumentasi



Gambar 9.Wawancara dengan Kepala Desa Aek Libung

Sumber : Di olah oleh peneliti



Gambar 10.Wawancara dengan Kepala Pengelola Objek Wisata Aek Sijorni

Sumber : Diolah oleh peneliti



Gambar 11. Wawancara dengan Pedagang/ Masyarakat (Ibu Nurlela, Bapak Rahmat, dan Ibu Suryani)

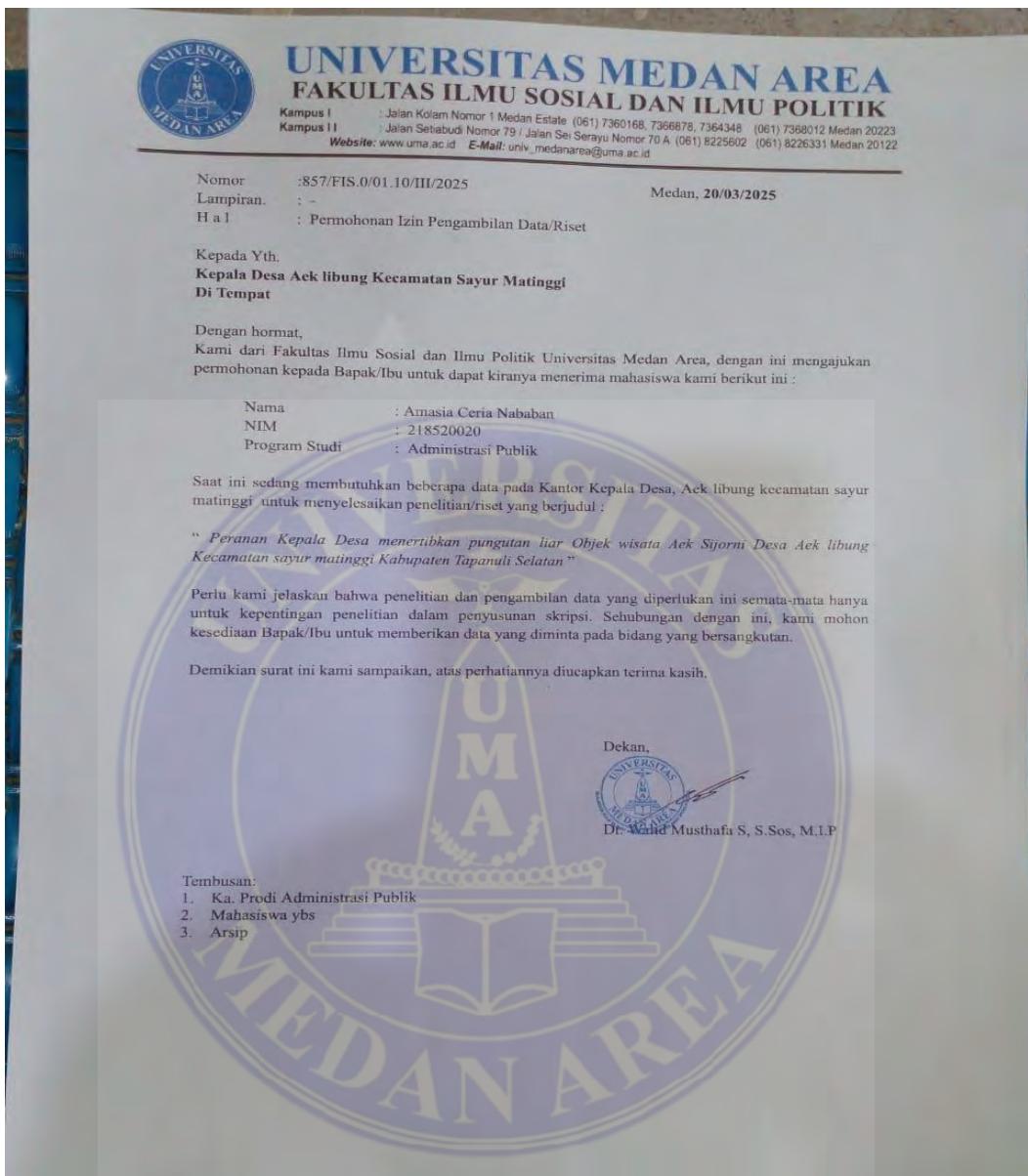
Sumber : Di olah oleh Peneliti



Gambar 12. Objek Wisata Aek Sijorni

Sumber : Internet

Lampiran 2.Surat Penelitian





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

73 Document Accepted 19/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/1/26

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara terkait penelitian “Peranan Kepala Desa Menertibkan Pungutan Liar Objek Wisata Aek Sijorni Desa Aek Libung Kabupaten Tapanuli Selatan” Berdasarkan Teori Suhardono (1994).

No	Jenis Informan	Motivator	Fasilitator	Mobilisator
1	Informan kunci (kepala desa)	<p>1. Apasaja upaya Bapak/Ibu dalam membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pungutan liar di kawasan objek wisata Aek Sijorni?</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan media tertentu (seperti spanduk, pertemuan warga, dll) untuk memberikan motivasi kepada masyarakat?</p> <p>3. Bagaimana respon masyarakat setelah diberikan penyuluhan atau sosialisasi oleh Bapak/Ibu terkait bahaya pungutan liar?</p>	<p>1. Bagaimana Bapak/Ibu memfasilitasi masyarakat dan pengelola wisata untuk bersama-sama mencegah pungutan liar?</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu menyediakan sarana atau media sosialisasi untuk edukasi tentang larangan pungli (misalnya banner, penyuluhan, spanduk)?</p> <p>3. Apakah pemerintah desa memfasilitasi pengaduan masyarakat atau wisatawan terkait pungli?</p>	<p>1. Bagaimana cara Bapak/Ibu menggerakkan masyarakat agar ikut aktif mengawasi dan menindak praktik pungutan liar di kawasan wisata?</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu pernah membentuk tim khusus atau satgas dari masyarakat desa untuk melakukan patroli atau pengawasan?</p> <p>3. Bagaimana Bapak/Ibu membagi peran dan tanggung jawab antar perangkat desa dalam kegiatan penertiban pungli?</p>

2	Informan utama (Kepala Pengelola Objek Wisata)	<p>1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang peran kepala desa dalam memberikan motivasi kepada warga untuk tidak melakukan pungutan liar?</p> <p>2. Apakah kepala desa pernah memberikan arahan atau imbauan kepada pihak pengelola terkait upaya menciptakan lingkungan wisata yang bebas pungli?</p> <p>3. Sejauh mana pengaruh motivasi atau ajakan kepala desa terhadap sikap warga atau pelaku usaha di sekitar kawasan wisata?</p>	<p>1. Apakah kepala desa menyediakan dukungan berupa fasilitas atau bantuan lain kepada pengelola dalam penertiban pungutan liar?</p> <p>2. Bagaimana bentuk kerja sama antara kepala desa dan pihak pengelola dalam menyediakan sarana atau mekanisme pengawasan terhadap pungli?</p> <p>3. Apakah kepala desa memfasilitasi pertemuan atau koordinasi antara pengelola dan masyarakat untuk membahas isu ketertiban di objek wisata?</p>	<p>1. Apakah kepala desa turut menggerakkan kelompok masyarakat, pemuda, atau aparat desa untuk mendukung pengelolaan wisata yang tertib?</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan oleh kepala desa dalam kegiatan bersama untuk mengawasi atau menindak pungli di kawasan wisata?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu, apakah kepala desa berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban objek wisata?</p>
---	--	---	--	--

3	Informan tambahan (Masyarakat atau pedagang yang tinggal di sekitar objek wisata)	<p>1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan ajakan atau imbauan dari kepala desa untuk tidak melakukan pungutan liar di kawasan wisata?</p> <p>2. Bagaimana cara kepala desa menyampaikan motivasi atau pesan kepada masyarakat agar menjaga ketertiban di objek wisata?</p> <p>3. Apakah ajakan atau motivasi dari kepala desa membuat Bapak/Ibu merasa terdorong untuk berperilaku tertib saat beraktivitas di sekitar wisata?</p>	<p>1. Apakah kepala desa menyediakan fasilitas seperti tempat berjualan yang tertib, pos keamanan, atau tempat pengaduan untuk masyarakat?</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan adanya fasilitas yang disediakan kepala desa atau pemerintah setempat di sekitar objek wisata?</p> <p>3. Apakah kepala desa pernah membantu masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau usulan terkait kegiatan di kawasan wisata?</p>	<p>1. Apakah Bapak/Ibu pernah diajak ikut serta oleh kepala desa dalam kegiatan bersama, seperti gotong royong atau pengawasan terhadap pungli?</p> <p>2. Apakah Bapak/Ibu melihat kepala desa menggerakkan masyarakat atau tokoh setempat untuk menjaga keamanan di kawasan wisata?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu, apakah tindakan kepala desa selama ini sudah cukup dalam mengajak masyarakat ikut menertibkan pungutan liar?</p>
---	---	--	--	--